

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Pemerintah Daerah Lumajang dalam merekonstruksi ketentuan batas hak milik tanah pasca bencana alam, khususnya akibat erupsi Gunung Semeru, guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat terdampak dan mencegah timbulnya konflik pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Lumajang memiliki peran strategis dalam proses rekonstruksi batas tanah, antara lain melalui inventarisasi ulang bidang tanah, pemetaan dan pengukuran ulang, validasi data kepemilikan, serta fasilitasi relokasi warga terdampak ke lokasi hunian yang baru. Pemerintah daerah juga dituntut untuk mengintegrasikan kebijakan pertanahan dengan rencana tata ruang wilayah agar sejalan dengan prinsip mitigasi risiko bencana dan pembangunan berkelanjutan. Tantangan utama yang dihadapi mencakup hilangnya dokumen pertanahan, kerusakan fisik wilayah, perubahan struktur pemanfaatan lahan, dan keterbatasan kapasitas teknis di tingkat lokal. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah daerah perlu dijalankan secara kolaboratif melalui koordinasi lintas sektor, penyusunan regulasi teknis yang adaptif, serta pelibatan aktif masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah, perlindungan hak konstitusional warga negara, kepastian hukum, dan keberlanjutan pengelolaan tata ruang pasca bencana.

Kata Kunci: Batas Hak Milik Tanah, Bencana Alam, Pemerintah Daerah, Rekonstruksi, Tanggung Jawab.

ABSTRACT

This study aims to analyse the responsibility of the Lumajang Regional Government in reconstructing land ownership boundaries after natural disasters, particularly those caused by the eruption of Mount Semeru, in order to ensure legal certainty for the affected communities and prevent land conflicts. This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and case approach. The results of the study indicate that the Lumajang Regional Government has a strategic role in the process of reconstructing land boundaries, including through re-inventorying land parcels, re-mapping and re-measuring, validating ownership data, and facilitating the relocation of affected residents to new housing locations. The regional government is also required to integrate land policies with spatial planning to align with the principles of disaster risk mitigation and sustainable development. The main challenges faced include the loss of land documents, physical damage to the area, changes in land use structure, and limited technical capacity at the local level. Therefore, the responsibilities of the local government must be carried out collaboratively through cross-sectoral coordination, the development of adaptive technical regulations, and active community involvement. This aligns with the principles of local autonomy, protection of citizens' constitutional rights, legal certainty, and sustainable spatial planning management post-disaster.

Keywords: Land Ownership Boundaries, Natural Disasters, Local Government, Reconstruction, Responsibility.